ANALISIS SEJARAH
https://dx.doi.org/10.25077/jas.v13i2.112

Laboratorium Sejarah
Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Vol. 13, No. 2, 2023 | 70-75

Perubahan Institusi Militer di Sumatera Tengah Menjelang Akhir Revolusi

Syafrizal*, Departemen Ilmu Sejarah, FIB Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

Tulisan ini membicarakan perubahan dalam dunia militer di Sumatera Tengah pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. TKR yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 memiliki dua komandemen, yaitu Komandemen Jawa dan Komandemen Sumatera. Komandemen Sumatera terdiri atas enam divisi, salah satu di antaranya adalah Divisi III/Banteng di Sumatera Tengah, meliputi wilayah Sumatera Barat dan Riau. Sejak awal tahun 1948 Divisi III diubah menjadi Divisi IX/Banteng TNI, dipimpin oleh seorang panglima (Kolonel Ismael Lengah), dan memiliki 22 batalyon sebagai pasukan tempur. Divisi IX/Banteng berhasil melindungi eksistensi PDRI yang bermarkas di Sumatera Barat, sehingga Belanda tidak berhasil melenyapkan RI melalui Agresi Militer II. Setelah munculnya indikasi Belanda mengakui kedaulatan RI, maka pemerintah RI merasa perlu melakukan penciutan terhadap angkatan perang melalui Program Reorganisasi dan Rasionalisasi. Dalam konteks itulah Divisi IX/Banteng yang punya panglima sendiri, diturunkan statusnya menjadi sebuah brigade di bawah komando Medan. Jumlah batalyon dikurangi secara drastis dari 22 menjadi 4 batalyon sehingga ribuan prajurit terpaksa diberhentikan.

ARTICLE HISTORY

Received 13/06/2023
Revised 19/06/2023
Accepted 27/06/2023
Published 08/07/2023

KEYWORDS

Divisi Banteng; institusi militer; reorganisasi; Sumatera Tengah.

***CORRESPONDENCE AUTHOR**

syafrizal.sirin63@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan, Negara Republik Indonesia terdiri atas delapan provinsi, salah satu di antaranya adalah Provinsi Sumatera. Pembagian administrasi wilayah pemerintahan Indonesia atas delapan provinsi itu, merupakan kelanjutan dari struktur birokrasi yang diciptakan pemerintahan kolonial Belanda sejak dekade 1920-an. Ketika berakhirnya kolonialisme Belanda, dan Indonesia diambil alih oleh pemerintahan pendudukan Jepang ternyata status Sumatera sebagai sebuah provinsi tetap berlanjut, dan malahan juga tetap dipertahankan oleh pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan.

Setingkat di bawah provinsi terdapat unit pemerintahan keresidenan, yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang residen. Dalam Provinsi Sumatera terdapat sebanyak sepuluh keresidenan yaitu Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Palembang, Bangka, Lampung, dan Bengkulu. Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hassan mengangkat residen-residen di Sumatera berdasarkan SK No. 1/X tertanggal 23 Oktober 1945 (Hassan, 1999, pp. 255-256).

Sebutan Sumatera Tengah muncul pertama kali dalam Konferensi Residen-Residen Sumatera di Bukittinggi. Pertemuan residen seluruh Sumatera yang berlangsung pada tanggal 16 April 1946, menghasilkan kesepakatan untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi tiga subprovinsi yaitu Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan (Hassan, 1999, pp. 435-436). Setiap subprovinsi dipimpin oleh seorang gubernur muda. Wilayah Sumatera Tengah meliputi tiga keresidenan yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pembentukan wilayah subprovinsi dalam perkembangan selanjutnya ternyata memunculkan wacana pemekaran wilayah Sumatera menjadi tiga provinsi, sehingga subprovinsi berubah status menjadi provinsi sepenuhnya.

Pada era perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di Sumatera Tengah dibentuk sebuah unit kesatuan militer yang diberi nama Divisi III/Banteng meliputi wilayah Sumatera Barat, dan Riau, sedangkan Jambi diintegrasikan ke dalam kesatuan militer Sumatera Selatan. Divisi III/Banteng bermarkas di Bukittinggi, berhasil mengamankan keberadaan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di pedalaman Sumatera Barat (Kahin, 1990, p. 172). Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan sejak tanggal 19 Desember 1948, berhasil merebut ibukota Republik Indonesia (RI) di Yogyakarta, dan berhasil pula menahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pembentukan PDRI di Sumatera Barat berhasil menyelamatkan Negara RI dari kehancuran.

Divisi III/Banteng Sumatera Tengah sukses mengamankan wilayah pedalaman Sumatera Barat dari gempuran Belanda. Kota-kota di Sumatera Barat memang dapat diduduki Belanda, namun wilayah pedalaman tempat bermarkasnya PDRI tetap dikuasai tentara dan pejuang kemerdekaan. Setelah perang kemerdekaan berakhir, pemerintah RI menjalankan Program Rera (Reorganisasi dan Rasionalisasi) tentara, sehingga Divisi III/Banteng diturunkan menjadi sebuah Brigade EE Banteng sehingga banyak prajurit terpaksa diberhentikan, kekecewaan meluas di kalangan sebagian besar prajurit.

Tulisan ini membicarakan dinamika militer di Sumatera Tengah pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tema kajian ini terkait erat dengan konsep sejarah militer, yaitu melihat perubahan yang dialami militer pada masa lampau. Menurut Connie Rahakundini Bakrie dan kawan-kawan, militer sebagai angkatan bersenjata dapat dipelajari dari berbagai aspek seperti kepemimpinan (perwira senior), personil militer (kelembagaan), dan peran militer dalam politik (Bakrie, et al., 2007, p. 41). Berdasarkan pandangan itu maka yang dibicarakan dalam tulisan ini adalah terbatas pada aspek kelembagaan, yaitu perubahan yang dialami unit militer di Sumatera Tengah dari Divisi III/Banteng menjadi Brigade EE Banteng.

PEMBAHASAN

Pembentukan Divisi III/Banteng Sumatera Tengah

Sebelum terbentuk wilayah administratif Sumatera Tengah, maka wilayah Sumatera Barat merupakan sebuah keresidenan dalam Provinsi Sumatera. Status Sumatera Barat sebagai sebuah keresidenan juga telah diberikan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sejak dekade 1910-an, dan status itu tetap bertahan pada saat berlangsungnya pendudukan bangsa Jepang di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintahan RI hampir tidak ada melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan daerah, termasuk Sumatera Barat.

Sejak awal kemerdekaan masyarakat Sumatera Barat melibatkan diri sepenuhnya dalam gerakan membela kemerdekaan Indonesia. Sebelum dibentuknya kesatuan militer, sesuai dengan himbauan pemerintah pusat maka di Sumatera Barat berhasil pula dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR bukanlah tentara reguler, melainkan korps pejuang bersenjata yang keanggotaannya berasal dari prajurit Indonesia yang dididik Jepang melalui Peta (Pembela Tanah Air), Gyugun, dan Heiho atau Pembantu Prajurit (Notosusanto, et al., 1985, pp. 36-37).

Gyugun (tentara sukarela) di Sumatera, dan di Jawa dinamakan Peta, dibentuk pemerintahan pendudukan Jepang dalam tahun 1943, yaitu ketika posisi Jepang semakin melemah dalam Perang Dunia II. Kehadiran tentara sukarela itu diharapkan bisa membantu Jepang menghadapi Sekutu. Residen Jepang di Sumatera Barat Yano Kenzo mengumpulkan pemuka masyarakat Minangkabau di antaranya Ahmad Datuk Simarajo (tokoh adat), Khatib Sulaiman (cerdik-pandai), dan H. Mahmud Yunus (ulama), guna membicarakan rencana pembentukan Gyugun di Sumatera Barat. Dalam pertemuan itu terbentuk *Gyugun Ko En Kai* yang diketuai oleh Khatib Sulaiman, guna mendorong pemuda Sumatera Barat memasuki Gyugun (Husein, et al., 1991, p. 56-59).

Kalangan pemuda di Sumatera Barat ternyata banyak yang berminat memasuki pendidikan militer pada Gyugun. Pendidikan militer dalam Gyugun terdiri dari dua jenis, yaitu mendidik calon perwira, dan bintara atau prajurit. Pada angkatan pertama Gyugun menerima siswa antara 350-400 orang (Zed & Chaniago, 2001, p. 26), dari jumlah itu hanya lima orang yang berhasil lulus dengan pangkat tertinggi yaitu Letnan Satu. Kelima Perwira Gyugun tersebut adalah Dahlan Djambek, Ismail Lengah, Syarif Usman, Dahlan Ibrahim, dan A. Thalib (Zed & Chaniago, 2001, p. 29). Siswa lainnya dilantik sebagai letnan dua, letnan muda, dan bintara.

Selama berkuasanya pemerintahan pendudukan Jepang, pendidikan militer yang diselenggarakan Gyugun di Sumatera Barat telah berhasil menamatkan tidak kurang dari 2.000 orang tentara, dan dari jumlah itu hanya sekitar 200 orang yang mengikuti pendidikan perwira (Zed & Chaniago, 2001, p. 33). Tentara tamatan Gyugun itu ditugaskan pada kamp-kamp konsentrasi yang dibangun pada banyak tempat seperti di Indarung, Padang, dan Pariaman. Setelah Jepang menyatakan kalah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, maka tentara Gyugun segera dibubarkan Jepang.

Dalam suasana *vacuum of power* atau kekosongan kekuasaan akibat kekalahan Jepang, dan lambatnya kedatangan Sekutu sebagai pemenang dalam Perang Dunia II, dimanfaatkan oleh pemimpin bangsa Indonesia untuk mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak lama berselang, guna mendukung kemerdekaan Indonesia maka bekas pemimpin Gyugun/Ko En Kai Khatib Sulaiman meminta Ismael Lengah (mantan perwira Gyugun) untuk segera memimpin perjuangan pemuda revolusioner. Dalam kaitan itulah melalui rapat pada tanggal 21 Agustus 1945 berdiri Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di Padang, diketuai oleh Ismail Lengah (Husein, et al., 1991, pp. 83-85). Keanggotaan BPPI terdiri dari kalangan bekas perwira Gyugun, tokoh masyarakat berjiwa revolusioner, dan kalangan pemuda pejuang.

BPPI dan beberapa orang bekas perwira Gyugun memprakarsai pembentukan BKR di wilayah Sumatera Barat. Pembentukan BKR dilakukan setelah keluarnya seruan KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Sumatera Barat pada tanggal 3 September 1945 (Enar, et al., 1978, p. 34). BPPI yang bermarkas di Padang, dan Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Bukittinggi, yang di dalamnya bergabung beberapa orang bekas perwira Gyugun memasuki nagari-nagari (Zed & Chaniago, 2001, p. 45), guna menghimbau bekas prajurit Gyugun, Heiho dan pemuda yang pernah mengikuti latihan militer masa Jepang agar bergabung menjadi anggota BKR. Pada intinya keanggotaan BKR terbuka bagi semua pemuda yang bertekad ingin berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Untuk mengorganisir bekas prajurit Gyugun menjadi inti kekuatan BKR pada berbagai daerah di Sumatera Barat, maka ditugaskan kepada bekas perwira Gyugun untuk melakukannya terutama pada daerah asal mereka. Dalam konteks itulah A. Thalib bergerak di daerah Pesisir Selatan/Kerinci, Syarif Usman di Solok, Dahlan Djambek di daerah Agam, Dahlan Ibrahim di Tanah Datar, dan Ismael Lengah untuk daerah Padang dan sekitarnya (Enar, et al., 1978, p. 34). Mereka akhirnya berhasil membentuk BKR di daerah masing-masing, guna mengamankan rakyat dalam proses transisi politik pada awal kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan BKR di Sumatera Barat tidak saja berlangsung di kota-kota pada berbagai daerah, namun juga meluas sampai ke tingkat kewedanaan. Kehadiran BKR di kewedanaan diprakarsai langsung oleh pimpinan KNID setempat seperti yang dilakukan oleh Mahyuddin Tonek di Pariaman, Zainal Arifin di Sijunjung, serta Makinuddin bersama Nurmatias dan Anwar di Payakumbuh (Enar, et al., 1978, p. 35). Eksistensi BKR ternyata tidak berlangsung lama, karena dipengaruhi situasi politik dalam negeri yang mengancam kemerdekaan Indonesia sejak kedatangan tentara Sekutu.

Kedatangan tentara Sekutu mendorong pemimpin RI untuk segera membentuk tentara reguler. Pada tanggal 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan tentara secara resmi, yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR), anggota BKR segera berafiliasi ke dalam TKR, dan mereka diberi pangkat militer. TKR secepatnya mengorganisir dirinya ke dalam dua komandemen, yaitu Komandemen Jawa dan Komandemen Sumatera. Setiap komandemen membawahi beberapa divisi, enam divisi berada di Sumatera dan 10 divisi berada di Jawa (Notosusanto, et al., 1985, pp. 42-43).

Salah satu Divisi TKR yang terbentuk di Sumatera adalah Divisi III/Banteng, yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Riau (Zed & Chaniago, 2001, p. 61). Dahlan Djambek mendapat amanah menjadi Komandan (Panglima) Divisi III yang pertama, ia diberi pemerintah pangkat Kolonel, dan Jazid Abidin diangkat menjadi Kepala Staf Divisi dengan pangkat Letnan Kolonel (Zed & Chaniago, 2001, pp. 61, 63). Dalam dinamika militer di Sumatera, maka divisi lebih dulu terbentuk daripada komandemen. Komandemen Sumatera dipimpin oleh seorang panglima, yaitu Panglima Tentara dan Territorium Sumatera atau disingkat PTTS (Undri, 2015, p. 240). Komandeman Sumatera semula berkedudukan di Sumatera Utara, kemudian menjelang terjadinya Agresi Militer Belanda yang pertama dalam bulan Juli 1947 dipindahkan ke Bukittinggi (Undri, 2015, p. 217).

Divisi III/Banteng terdiri dari empat resimen meliputi wilayah Keresidenan Sumatera Barat, dan Keresidenan Riau. Resimen I di Bukittinggi dipimpin oleh Letkol Syarif Usman, Resimen II bermarkas di Batusangkar dikomandani oleh Letkol Dahlan Ibrahim, Resimen III dikomandani Letkol Ismael Lengah berkedudukan di Lubuk Alung, dan Resimen IV bermarkas di Pekanbaru dikomandani oleh Letkol Hasan Basri (Enar, et al., 1978, pp. 58-59). Setiap resimen

membawahi beberapa batalyon, dan setiap batalyon terdiri pula atas beberapa kompi. Batalyon dan kompi merupakan pasukan tempur yang siap berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat juga melibatkan barisan-barisan semi militer atau lasykar rakyat di bawah kendali partai politik dan Muhammadiyah. Tentara reguler dan lasykar rakyat bertempur menghadapi Inggris dan Belanda di wilayah demarkasi pinggiran utara Padang. Lasykar rakyat yang terlibat dalam pertempuran itu adalah pasukan Hizbullah milik Muhammadiyah (dipimpin Maksum), dan pasukan Sabilillah milik Partai Masyumi yang dipimpin Munyar Atini (Kahin, 1997, pp. 168-169).

Dalam perkembangan selanjutnya lasykar atau barisan-barisan rakyat digabungkan ke dalam tentara reguler. Divisi III yang telah berubah status menjadi Divisi IX/Banteng TNI (Tentara Nasional Indonesia) membentuk Komando Legiun Syahid dipimpin Kolonel Syarif Usman, yang bertugas merekrut anggota lasykar ke dalam TNI. Akhirnya pada tanggal 19 Januari 1948 secara resmi lasykar diintegrasikan ke dalam Divisi IX/Banteng menjadi satu resimen membawahi 4 batalton (Kahin, 1997, p. 169).

Diciutkan Menjadi Brigade EE/Banteng

Penciutan terhadap Divisi IX/Banteng menjadi sebuah brigade yaitu Brigade EE/Banteng, dilakukan pemerintah melalui Program Rera (Reorganisasi dan Rasionalisasi) pada bulan Oktober 1949. Sebelum dilakukannya penciutan itu, Divisi IX/Banteng yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Riau dipimpin oleh seorang panglima yaitu Kolonel Ismael Lengah. Pada awal tahun 1948 Divisi IX/Banteng membawahi enam resimen, dan memiliki 22 batalyon (Enar, et al., 1978, p. 197). Batalyon itu sebagian besar berada di wilayah Sumatera Barat, hanya sekitar tiga atau empat batalyon yang berlokasi di Riau.

Program Rera terhadap tubuh angkatan perang merupakan salah satu program dari Kabinet Mohammad Hatta, yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi perdana menteri menggantikan Amir Syarifuddin terhitung mulai tanggal 29 Januari 1948 (Kahin, 1995, pp. 291-293). Pelaksanaan rasionalisasi angkatan perang itu bertujuan untuk memperkecil jumlah personil militer, namun terlatih untuk membina pertahanan rakyat semesta atau lasykar teritorial (Kahin, 1995, pp. 330-333). Gagasan perampingan angkatan perang mendesak dilakukan mengingat semakin mengecilnya wilayah kekuasaan RI akibat Persetujuan Renville (Januari 1948), pasukan TNI harus meninggalkan banyak kantong-kantong gerilya menuju wilayah RI (Kahin, 1995, pp. 294-295), sehingga jumlah tentara yang banyak menjadi tidak efisien dan hanya menambah pengeluaran keuangan negara.

Rencana pelaksanaan Rera di Sumatera pada mulanya mengalami penolakan. Dalam perjalanannya bersama Mohammad Hatta ke Bukittinggi pada bulan April 1948, Kolonel Nasution menyampaikan langkah-langkah rasionalisasi kepada perwira Komando Sumatera, ternyata semua perwira menolak program itu karena wilayah Sumatera hanya seperlima yang dikuasai Belanda, dan keberadaan tentara di Sumatera tidak akan membebani keuangan Negara (Undri, 2015, p. 218). Prajurit yang banyak masih dibutuhkan keberadaannya di Sumatera guna menghadapi Belanda, yang ingin melenyapkan Indonesia pasca ditandatanganinya Perjanjian Renville pada bulan Januari 1948.

Wilayah RI di Jawa dan Sumatera semakin dipersempit oleh Belanda melalui Perjanjian Renville. Bersamaan dengan itu Belanda menyusun kekuatan dan menyiapkan diri untuk melakukan agresi militernya yang kedua terhadap Indonesia. Terbukti pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II, ibukota RI Yogyakarta berhasil direbut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berhasil ditangkap.

Agresi Militer Belanda II tidak berhasil melenyapkan keberadaan Negara RI, karena di Kota Bukittinggi (Sumatera Barat) dapat dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Menteri Kemakmuran Rakyat RI Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Bukittinggi, pada hari pertama Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 segera mengadakan pertemuan dengan pemimpin pemerintahan Sumatera Barat, Panglima Komando Sumatera (Kolonel Hidayat), dan Mr. Teuku Mohammad Hassan (Komisariat Pemerintah Pusat). Dari pertemuan itulah berhasil dibentuk PDRI, dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mendapat amanah menjadi Ketua PDRI.

Berhubung situasi Kota Bukittinggi tidak aman akibat adanya serangan militer Belanda, maka Mr. Sjafruddin Prawiranegara bersama pejabat pemerintahan dan militer segera mengungsi ke Halaban, yaitu sebuah wilayah perkebunan teh dekat Kota Payakumbuh. Kabinet PDRI diumumkan di Halaban pada tanggal 22 Desember 1948, dan tidak lama kemudian Mr. Sjafruddin Prawiranegara beserta rombongan PDRI pindah lagi ke Bidar Alam yang terletak di kawasan Solok Selatan (Zed, 1997, p. 115). Rombongan PDRI sampai di Bidar Alam pada tanggal 24 Januari 1949, dan bertahan di nagari itu selama lebih kurang tiga bulan, mereka menempati rumah-rumah penduduk (Zed, 1997, pp. 125-126).

Pusat pemerintahan PDRI bersifat mobil, yaitu berpindah-pindah pada beberapa tempat di wilayah pedalaman Sumatera Barat. Kota-kota di Sumatera Barat memang berhasil diduduki Belanda melalui Agresi Militer II, namun Belanda gagal menguasai wilayah pedalaman Sumatera Barat. Tentara dari Divisi IX/Banteng, bersama pemuda pejuang dan semua lapisan masyarakat berhasil menggagalkan usaha Belanda untuk menguasai wilayah pedalaman Sumatera Barat (Kahin, 1990, pp. 169-172). Pemuda nagari diorganisir ke dalam Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK), mereka dilatih oleh anggota TNI Divisi IX/Banteng guna memata-matai dan merintangi gerakan Belanda (Kahin, 1997, p. 233). Anggota BPNK yang terbaik diintegrasikan ke dalam Pasukan Mobil Teras (PMT) pada tingkat kecamatan, mereka dipersenjatai oleh TNI (Kahin, 1997, p. 233).

Keberadaan anggota TNI dari Divisi IX/Banteng, dan kemampuannya membina anggota BPNK dan PMT, dan dukungan semua lapisan masyarakat, berhasil menggagalkan usaha Belanda untuk menguasai wilayah pedalaman Sumatera Barat. Keadaan itu memberikan kenyamanan bagi Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan para menterinya yang berada di pedalaman Sumatera Barat, untuk bekerja menyelamatkan Negara RI dari gempuran Belanda. Setelah adanya intervensi Amerika Serikat akhirnya Belanda bersedia mengakhiri usahanya untuk menguasai Indonesia pada akhir tahun 1949 melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Sebelum berunding, Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan mandatnya kembali kepada pemerintah pusat dalam sidang kabinet di Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 1949 (Rosidi, 1986, pp. 130-131).

Semenjak adanya indikasi perang kemerdekaan akan segera berakhir, pemerintah pusat memaksakan pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi (Rera) terhadap tubuh militer. Dalam kaitan itulah maka pada bulan Oktober 1949, sebagai realisasi atas pelaksanaan Rera, Divisi IX/Banteng diciutkan menjadi sebuah brigade yaitu Brigade EE Banteng di bawah komando Medan (Leirissa, 1991, p. 36). Ketika berstatus sebagai Divisi IX/Banteng kepemimpinan berada di tangan seorang panglima, wilayah komandonya meliputi Sumatera Tengah di luar Jambi. Berbeda keadaannya setelah diciutkan menjadi Brigade EE Banteng, kepemimpinan berada di tangan seorang komandan di bawah kendali panglima yang berkedudukan di Medan.

Selain itu, terjadi pula pemisahan wilayah Riau dari Sumatera Barat, Riau berada di bawah Brigade Banteng Sub Teritorium Riau Indragiri yang dikomandani oleh Letkol Hasan Basri, dan bermarkas di Pekanbaru (Enar, et al., 1978, p. 199). Sumatera Barat berada di bawah Brigade Sub Teritorium tersendiri, semula dikomandani oleh Letkol Dahlan Ibrahim dan berkedudukan di Bukittinggi (Enar, et al., 1978, p. 199). Penciutan dari divisi menjadi brigade menyebabkan pula terjadinya pengurangan jumlah batalyon secara drastis. Untuk daerah Sumatera Barat saja, semula terdapat sekitar 18 batalyon, namun setelah menjadi brigade maka komando militer di Sumatera Barat hanya memiliki enam batalyon.

Pelaksanaan Rera yang dilandasi oleh pemikiran untuk menciptakan organisasi militer yang ramping dengan jumlah personil yang tidak terlalu banyak namun profesional, sehingga meringankan beban keuangan negara. Konsekuensi logis dari pelaksanaan Rera adalah banyaknya prajurit yang diberhentikan dari dinas militer. Menurut Mestika Zed dan Hasril Chaniago, sekitar 20.000 prajurit terpaksa diberhentikan dan hanya sekitar 3.000 prajurit yang dipakai dalam Brigade Banteng (Zed & Chaniago, 2001, p. 111).

Pada akhir Desember 1949 telah terbentuk secara lengkap Brigade EE Banteng dengan formasi enam batalyon yaitu Batalyon Kuranji, Pagar Ruyung, Kinantan, Buaya Putih, Gumarang, dan Batalyon Sibinuang (Zed & Chaniago, 2001, p. 111). Markas Brigade EE Banteng akhirnya dipindahkan ke Kota Padang, menempati gedung bekas Balai Kota Padang di dekat Lapangan Imam Bonjol. Sejak Agustus 1951 Letkol Ahmad Husein diangkat menjadi Komandan.

SIMPULAN

Pada awal kemerdekaan terdapat kesatuan militer di Sumatera Barat yaitu Divisi III TKR/Banteng membawahi wilayah Sumatera Barat dan Riau. Kedua wilayah itu bersama Jambi dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Tengah, namun wilayah Divisi III/Banteng tetap meliputi Sumatera Barat dan Riau. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, maka nama TNI muncul menjelang terjadinya Agresi Militer Belanda I, dan bersamaan dengan Divisi III berubah pula menjadi Divisi IX/Banteng. Selama masa sulit perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat adanya Agresi Militer Belanda II, prajurit Divisi IX/Banteng melancarkan perang gerilya di daerah pedalaman Sumatera Barat, yaitu tempat berlokasinya markas PDRI, sehingga Belanda tidak berhasil menguasai wilayah itu. PDRI mampu menjalankan fungsinya sebagai penyelamat Negara RI dari kehancuran, ketika situasi keamanan mulai kondusif PDRI mengembalikan mandatnya kepada pemerintah RI dalam pertengahan tahun 1949. Belanda mulai memperlunak sikapnya terhadap Indonesia terutama setelah adanya intervensi Amerika Serikat, pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan tinggal menunggu waktu saja. Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta yang menggagas kebijakan Rera pada awal tahun 1948, berusaha dijalankan sepenuhnya menjelang akhir tahun 1949. Dalam kaitan itulah Divisi IX/Banteng diciutkan menjadi sebuah brigade yaitu Brigade EE Banteng di bawah komando Medan. Penciutan Divisi IX/Banteng menjadi Brigade EE Banteng hanya menyisakan enam batalyon di Sumatera Barat, sekitar 14 batalyon mengalami pembubaran. Pengurangan jumlah batalyon menyebabkan pula banyak prajurit eks Divisi IX/Banteng diberhentikan dari dinas militer. Sebagian besar prajurit itu merasakan tindakan pemerintah itu tidak bijaksana, jasa mereka dalam perang kemerdekaan terasa dilupakan oleh pemerintah. Menurut sejarawan Prof. Dr. R.Z. Leirissa, prajurit itu diperlakukan pemerintah seperti habis manis sepah dibuang, dan situasi itu menjadi salah satu penyebab memburuknya hubungan pemerintah pusat dengan daerah Sumatera Barat, yang berujung pada pecahnya pergolakan daerah tahun 1958 (Leirissa, 1991, pp. 35-37).

REFERENSI

Bakrie, Connie Rahakundini, et al., (2007). *Pertahanan Negara Dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Enar, Fatimah, et al. (1978). *Sumatera Barat 1945-1949.* Padang: Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Hassan, Teuku Mohammad. (1999). *Memoir Gubernur Sumatera: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Husein, Ahmad, et al. (1991). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950 Jilid I*. Jakarta: BPSIM.

Kahin, Audrey R. (1990). Sumatera Barat: Pos Terdepan Republik, dalam Audrey R. Kahin, ed., *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kahin, Audrey R. (1997). *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950.* Padang: MSI Sumatera Barat.

Kahin, George McTurnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.* Solo-Jakarta: Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan.

Leirissa, R.Z. (1991). *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Notosusanto, Nugroho, et al. (1985). *Pejuang Dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan.

Rosidi, Ajip. (1986). *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT.* Jakarta: Inti Idayu Press.

Undri. (2015). Sejarah Komandemen Sumatera Di Provinsi Sumatera Barat (1945-1949, dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, *1*(2).

Zed, Mestika & Chaniago, Hasril. (2001). *Perlawanan Seorang Prajurit: Biografi Kolonel Ahmad Husein*. Jakarta: Sinar Harapan.

Zed, Mestika. (1997). Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.